

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Depok merupakan sebuah kota di Jawa Barat dan termasuk dalam salah satu provinsi Jawa Barat yang terletak di selatan Jakarta, antara Jakarta dan Bogor. Berdasarkan undang-undang no.15 tahun 1999, tentang pembentukan kota madya TK.II Depok yang ditetapkan tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 disertai dengan pelantikan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah TK.II Depok dan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Depok dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan dijadikan sebagai hari jadi kota Depok.

Portal resmi kota Depok (*depok.go.id*) mengungkapkan bahwa kota Depok memiliki visi yaitu, Kota Depok yang unggul, aman, dan religius. Untuk merealisasikan visi yang disebutkan maka terdapat misi-misi kota Depok alam mewujudkannya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata, Berwawasan lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan

wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan serta bertujuan untuk kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Dalam mewujudkan visi dan misi, serta mewujudkan tujuan dari kota Depok tersebut, kota Depok memiliki Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Depok, sebagai organisasi sektor publik pelaksana fungsi eksekutif yang harus saling berkoordinasi satu sama lain agar pemerintahan kota Depok bisa berjalan dengan baik.

Kota Depok berupaya untuk terus mengembangkan manajemen keuangan pemerintah serta manajerial termasuk mempermudah pengawasan maupun pengembangan tata kelola pemerintahan di Kota Depok yang lebih baik lagi, demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya tersebut dibuktikan dengan kerjasama atau MOU antar Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat (BPKP) dengan Pemerintah Kota Depok agar dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabilitas ,serta dapat mempertahankan opini WTP yang sudah didapat. Sehingga misi Kota Depok menjadi kota yang unggul, nyaman dan religius tercipta dengan baik. (sumber : *poskotanews.com*)

Berdasarkan situs portal resmi kota Depok (*depok.go.id*) jumlah SKPD yang berada di kota Depok yaitu Inspektorat Daerah, 1 Kantor, 6 badan,dan 13 dinas yang terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
6. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
7. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro

10. Dinas Penindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Pertanian dan Perikanan
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15. Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
16. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17. Badan Keuangan Daerah
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
19. Badan Lingkungan Hidup
20. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2 Latar Belakang Masalah

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas membantu memenuhi kewajiban pemerintah terbuka secara publik.(Renyowijoyo,2010). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Pelaporan keuangan suatu entitas bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

LKPD yang berkualitas adalah LKPD yang dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas, selain itu LKPD yang berkualitas juga dapat menunjukkan bahwa SKPD tersebut telah melaksanakan fungsi eksekutif organisasi dengan baik. Selanjutnya, dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas LKPD yang diterbitkan atau disusun oleh SKPD harus memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PP No.1 tahun 2010, karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik-karakteristik tersebut ialah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas LKPDnya, yang mengandung informasi yang berguna untuk berbagai pihak, dan LKPD yang berkualitas dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik Pemerintah Daerah (PEMDA), serta memenuhi tujuan-tujuan dari laporan keuangan sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah LKPD tersebut berkualitas, LKPD yang disajikan, kemudian diterbitkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah diterbitkan, BPK mengeluarkan opini atas LKPD tersebut. Indikator bahwa LKPD sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap LKPD (Adhi, dkk.2013). Selanjutnya, terdapat 4 kriteria opini atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Mengeluarkan Pendapat (TMP)
4. Tidak Wajar (TW)

Tabel 1.1
Daftar Opini Laporan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2015

Provinsi Jawa Barat		27		27		28		28	
LKPD									
NO	ENTITAS PEMERINTAHAN	OPINI TAHUN 2012		OPINI TAHUN 2013		OPINI TAHUN 2014		OPINI TAHUN 2015	
1	Provinsi Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	Kab.Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	Kab.Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	Kab.Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
5	Kab.Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	Kab.Ciamis	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
7	Kab.Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	Kab.Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	Kab.Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
10	Kab.Indramayu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
11	Kab.Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
12	Kab.Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
13	Kab.Majalengka	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
14	Kab.Pangandaran					1	WDP	1	WDP
15	Kab.Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16	Kab.Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
17	Kab.Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	Kab.Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
19	Kab.Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
20	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	Kota bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	Kota Cimahi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
25	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
28	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I 2016

Data diatas menunjukkan bahwa LKPD dari SKPD yang berada di Kota Depok mendapatkan Opini WTP selama tahun 2012,2013,2014, dan 2015 atau 4 tahun berturut-turut dibandingkan dengan kota-kota atau kabupaten-kabupaten lainnya yang berada di Jawa Barat. Hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan SKPD di kota Depok terutama dalam bidang keuangan/pelaporan keuangan sudah lebih maju dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain yang berada dilingkup wilayah Jawa Barat, sehingga penulis memilih untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang mendukung SKPD kota Depok untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kota Depok.

Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Ini artinya, Depok mendapatkan predikat Opini WTP selama empat tahun berturut-turut sejak 2011. Predikat terbaik ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan Pemkot Depok disajikan secara wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat Opini WTP bermakna sangat besar bagi Depok. Boleh dikatakan, titik awal segala macam kegiatan adalah uang. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemkot Depok terhadap aset yang dimiliki, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan kejujuran dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Lima prinsip tata pemerintahan yang baik di antaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. (sumber : *depoknews.id*).

Menurut (Winidyaningrum, dkk.2010) terdapat faktor-faktor dalam menghasilkan LKPD yang andal dan tepat waktu, yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangat dibutuhkan. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie : 2012). Dalam berita yang dikutip, Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa, menyatakan agar pemerintah daerah menggunakan SDM sesuai kompetisi dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam perbaikan sistem dan penyajian Laporan Keuangan Daerah (LKPD). (sumber : *republika.co.id*).

Selanjutnya, dalam acara penghargaan atas opini WTP yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Depok yang diberikan oleh Presiden Jokowi, walikota Depok menyampaikan “WTP yang berhasil diraih Kota Depok dari Tahun 2011

sampai dengan Tahun 2015 dan mendapatkan penghargaan dari Presiden adalah berkat kerjasama serta keuletan Aparatur Sipil Negara Pemkot Depok”. (sumber : *depokpos.com*). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pemerintah kota Depok dapat mempengaruhi opini WTP yang didapat oleh Pemerintah Kota Depok.

Menurut (Karmila, dkk:2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun menurut (Andini, dkk.2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga menarik kesimpulan bahwa semakin kompeten sumber daya manusia pembuat laporan keuangan maka akan semakin baik pula LKPD yang dihasilkan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut peneliti ingin meneliti apakah kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

Selanjutnya penerapan SAKD, penerapan akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan pengguna LKPD serta upaya dalam meningkatkan kualitas dari LKPD tersebut. Pada tahun 2015 seluruh sektor pemerintahan sudah harus menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketika SAKD diterapkan dengan baik maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Drama:2014).

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan PEMDA di Indonesia. Berdasarkan pasal 232 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa Standar

Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) harus diselenggarakan oleh setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi. SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual juga bisa meningkatkan evaluasi akuntabilitas atas laporan keuangan yang disajikan. (sumber : *kumparan.com*). Lalu menurut berita yang dikutip, pemberian opini WTP diberikan, karena pemerintah dan entitas yang bersangkutan telah menyajikan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (sumber : *inipasti.com*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kota Depok dalam menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual, baik pada penerapan sistem akuntansinya maupun pada penyajian keuangannya, dalam acara penghargaan atas opini WTP yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Depok yang diberikan oleh Presiden Jokowi, walikota Depok menyampaikan “Manfaat yang didapat dari Akuntansi Berbasis Akrual, diantaranya dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah”. (sumber : *depokpos.com*). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa basis akrual yang diterapkan dalam pemerintah daerah Kota Depok membantu Pemerintah Kota Depok dalam meraih opini WTP.

Menurut penelitian (Ihsanti.2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas dari LKPD, dikarenakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan sistem akuntansi keuangan namun, menurut (Andini,dkk.2015) menyatakan hasil dalam penelitiannya bahwa penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan penemuan tersebut, peneliti mengangkat penerapan SAKD sebagai variabel kedua dalam penelitian ini.

Selanjutnya, yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah pemanfaatan teknologi informasi. Di zaman modern ini teknologi dipandang sebagai alat wajib dan sangat membantu individu untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, namun jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal (Karmila dkk.2014). Banyak manfaat yang didapatkan dalam pemanfaatan teknologi informasi diantaranya kecepatan pemrosesan transaksi, kecepatan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data, biaya pemrosesan yang rendah, dan sebagainya. Namun, dalam implementasi pemanfaatan teknologi informasi masih terdapat beberapa hambatan seperti biaya yang tidak murah, kondisi perangkat keras dan lunak, teknik pengelolaan data, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan dana. Kendala tersebut yang menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi untuk kualitas LKPD di SKPD belum maksimal. Dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat mengintegrasikan perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. (sumber : *kumparan.com*)

Penggunaan TI perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam urusan pemerintahan serta tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah. Kepala DPPKA Kota Depok, Farah Mulyati mengungkapkan, hal ini penting dilakukan guna memberikan kemudahan dalam proses pemasukan data atau perhitungan keuangan. “Pengembangan dan pemeliharaan sistem pelayanan berbasis TI ini kami lakukan guna

memperlancar penyusunan laporan keuangan dan aset daerah di Kota Depok,” tuturnya saat memberikan pemaparan pada Forum OPD DPPKA Depok di aula DPPKA Kota Depok. (sumber : *depok.go.id*). Dapat disimpulkan bahwa dalam Pemerintah Kota Depok, memanfaatkan teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut penelitian (Prpto:2011) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih mengalami kendala dalam peralatan dan *software* yang mendukung tetapi, menurut (Karmila,dkk:2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan penemuan tersebut, peneliti mengangkat pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel ketiga dalam penelitian ini.

Selanjutnya, hal terakhir yang mempengaruhi kualitas LKPD ialah sistem pengendalian internal pemerintah daerah itu sendiri. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sapto Amal Damandari, menjelaskan kalau pemberian opini WTP tersebut bukan berarti tidak korupsi. Menurutnya, pemberian opini WTP diberikan, karena pemerintah dan entitas yang bersangkutan telah menyajikan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).“Misalnnnya, sistem

pengendalian internal (SPI) telah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Selain itu secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. *Clear and clear* WTP tidak ada. Harapannya tidak ada korupsi, tapi kenyatannya walau pun WTP tetap ada kerugian negara,” kata Sapto, Rabu (15/3/2017) pada Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada Entitas Pemeriksaan Wilayah Sulawesi. (sumber : *inipasti.com*)

Setiap temuan terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas LKPD yang diterbitkan serta mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan. Kelemahan SPI tersebut meliputi antara lain kebijakan akuntansi untuk penerapan SAP berbasis akrual belum memadai, inkonsistensi penggunaan tarif pajak yang dapat mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dan kelemahan SPI lainnya pada persediaan, piutang, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban serta penyajian laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional yang nantinya akan mempengaruhi dari kualitas LKPD yang diterbitkan. (sumber : IHPS BPK Semester I 2016). Penguatan sistem pengendalian intern serta penyelesaian kerugian daerah dapat mendorong perbaikan opini laporan keuangan. (sumber : *bolomora.com*).

Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 bertempat di Graha Insan Cita, Jl.Prof.Lafran Pane, Sukmajaya, Kota Depok. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Setda, Kasubag Umum dan PEP OPD se-Kota Depok, dan Sekretaris Kecamatan Se-Kota

Depok,. Acara ini di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Hj.Ety Suryahati, SE, MSi, yang dalam sambutannya menekankan fungsi strategis dari Subag. Umum dan PEP pada kelangsungan pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu disampaikan juga terkaitnya pentingnya pelaporan untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perencanaan di masa yang akan datang dan dapat mendorong kinerja OPD menuju ke arah yang lebih baik. (sumber : *depok.go.id*). Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok menerapkan pengendalian internalnya dalam mendukung instansi untuk mendorong kinerja termasuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik lagi.

Menurut penelitian (Drama.2014) pada penelitiannya menunjukan hasil bahwa Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD dikarenakan sistem pengendalian intern yang diteliti dalam objek penelitian sudah berjalan dengan baik dalam unsur-unsur sebagaimana SPI yang sebenarnya. Namun menurut, (Novalia.2015) pada penelitiannya menunjukan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel keempat dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas LKPD, yaitu : Dewi Andini dan Yusrawati (2015), Karmila dkk (2014), dan Ihsanti (2014) bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel terhadap kualitas LKPD dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang terdapat di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi**

Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.

1.3 Rumusan Masalah

LKPD bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan pengelolaan keuangan suatu unit daerah. LKPD yang diterbitkan harus memenuhi prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar LKPD tersebut dapat berkualitas serta dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana tujuan dari LKPD tersebut terhadap pengguna LKPD tersebut, serta memperoleh opini audit WTP oleh BPK. Sehingga, dalam menerbitkan LKPD dibutuhkan beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan juga sistem pengendalian internal.

Selain beberapa faktor diatas peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga merupakan hal wajib yang harus diterapkan oleh beberapa unit pemerintah daerah, seperti keluarnya PP No.71 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan sudah harus menggunakan sistem basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. Sehingga pada tahun 2015 seluruh sektor pemerintah yang ada di Indonesia harus sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?

2. Bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
 - a. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
 - b. Bagaimana pengaruh SAKD terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
 - c. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
 - d. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi, penerapan sistem pengendalian internal, dan kualitas LKPD di SKPD Kota Depok
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap LKPD di SKPD Kota Depok
 - b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.

- d. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, baik secara aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.
2. Menambah wawasan,serta referensi bagi para pembaca, dan peneliti selanjutnya tentang akuntansi pemerintahan dan LKPD.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam meningkatkan laporan keuangan daerah Kota Depok.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kota Depok, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Depok.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), dan penerapan sistem pengendalian internal (X4).

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variable Y adalah kualitas laporan keuangan daerah.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian seluruhnya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Depok mencakup Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.8 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, variable operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.